

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi ekonomi di dunia pada saat ini sedang mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang berawal pada tahun 2020 hingga sekarang tahun 2021. Kondisi perekonomian negara-negara di dunia sebagian besar terhambat dan dapat dikatakan tumbuh negatif bahkan mengalami resesi, hanya sebagian kecil negara di dunia yang mampu bertahan dan ekonominya tumbuh di tahun 2020. Semua negara di dunia berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya supaya tidak sampai mengalami resesi dan berharap bisa bangkit kembali seperti semula.

Kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan karena covid-19, namun mampu bangkit kembali pada tahun 2021 bulan Agustus. Upaya pemerintah dalam mengatasi kejadian tersebut dengan cara meningkatkan pembangunan ekonomi negara Indonesia, salah satu cara yang dilakukan yaitu mengembangkan perekonomian negara secara terencana dan terstruktur agar negara Indonesia mampu bangkit kembali perekonomiannya.

Pembangunan ekonomi menurut (Kuncoro, 2013) yaitu suatu proses pendapatan riil perkapita penduduk dalam suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan pada segala aspek di kehidupan masyarakat yang mengarahkan mereka untuk mencapai suatu keadaan dan tingkat kehidupan yang di inginkan. Sedangkan menurut Arsyad (2010)

Pembangunan ekonomi merupakan proses dalam jangka panjang dalam perbaikan sistem kelembagaan yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut; 1) Suatu proses suatu perubahan yang terjadi secara kontinu; 2) Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita; 3) Kenaikan pendapatan per kapita wajib terus berlangsung dalam jangka; serta 4) Memperbaiki segala bidang sistem kelembagaan (seperti ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya).

Dan untuk pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, sarana dan prasarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas (Fattah & Rahman, 2013). Dari pernyataan di atas sebagai transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya dapat dilihat dari peningkatan atau pertumbuhan pada sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah tersebut, apabila sektor-sektor ekonomi berjalan dengan baik maka proses pembangunan suatu daerah akan terlihat dan membawa dampak positif bagi daerah itu sendiri

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat diamati dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi menurut (Boediono, 2001) merupakan suatu proses kenaikan kapabilitas produksi suatu perekonomian yang berwujud dalam bentuk kenaikan atau peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat mengalami peningkatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya, kemampuan perekonomian suatu daerah diharapkan meningkat dan dengan adanya proses peningkatan yang terus menerus dalam jangka panjang tujuannya untuk mendorong peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menurut (Agma, 2015) adalah suatu perkembangan dari sebuah kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan output dalam masyarakat dan mendorong peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara juga akan meningkat karena apabila semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka akan meningkat juga kenaikan output per kapitanya. Serta kenaikan output per kapita salah satu cirinya yaitu produksi dalam sektor industri semakin bertambah. Dengan arti lain apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami peningkatan maka sudah pasti produksi barang industrinya mengalami peningkatan (Margalita et al., 2015). Pertumbuhan ekonomi bukan gambaran ekonomi pada saat tertentu melainkan suatu proses, sehingga dapat dilihat perkembangan perekonomiannya atau disebut juga suatu kedinamisan suatu perekonomian yang berubah dari waktu ke waktu. Jika pada tahun tertentu seluruh sumbangan riil terhadap penggunaan faktor produksi lebih besar dari pada tahun sebelumnya, maka perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain jika pada tahun tertentu pendapatan riil masyarakat lebih besar

dari pendapatan tahun sebelumnya maka dapat dikatakan perekonomian mengalami pertumbuhan. (Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan 2002) bahwa pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi berbeda pengertian, untuk pembangunan ekonomi yaitu secara otomatis terjadi perubahan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang nantinya akan mengakibatkan keadaan sebelumnya akan berubah dan berganti situasi keseimbangannya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan secara perlahan dan stabil dalam jangka panjang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat atau mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. Bahkan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan meningkat hanya dengan melihat pada pertumbuhan ekonominya. Menurut (Todaro, 2000) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai total dari nilai output akhir yang didapatkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik dilaksanakan penduduk daerah ataupun penduduk dari daerah lain yang tinggal di daerah tersebut). PDRB adalah total semua nilai tambah barang dan jasa yang didapat dari berbagai aktivitas ekonomi pada suatu daerah atau wilayah, tidak melihat akan pemilik atas faktor produksinya baik penduduk wilayah tersebut maupun penduduk dari luar wilayah lain yang tinggal di wilayah tersebut (Kairupan, 2013). Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator pembangunan daerah, juga sekaligus berfungsi sebagai tolak ukur dalam melihat kemakmuran suatu daerah. Dalam Produk Domestik Regional Bruto terdapat sektor- sektor ekonomi yang berperan atas besar dan kecilnya angka PDRB. Setiap sektor ekonomi yang ada pada lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan yang berbeda-beda besarnya. Berdasarkan perhitungan (Badan Pusat Statistik

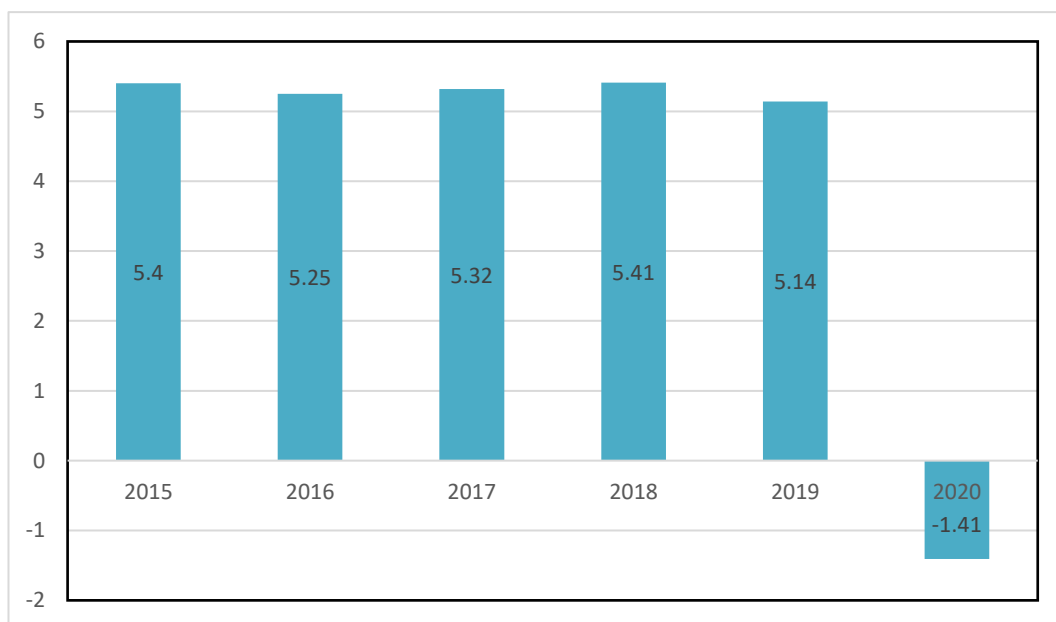
Kabupaten Wonogiri, 2021) dalam PDRB terdapat 17 kategori lapangan usaha dan pada kategori masih dirinci lagi menjadi subkategori. Dalam 17 kategori terdapat kategori Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor); Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estat; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa Lainnya.

Otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan daerah dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan, di dalam suatu otonomi daerah terdapat sebuah kewenangan yang di miliki suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan daerahnya namun kebutuhan daerah yang lain masih harus di sesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan hukum mengenai otonomi daerah pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004) yang membahas tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah akan terjadi sistem pemerintahan yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya utamanya pengelolaan pembangunan daerah karena pola pembangunan pada daerah bergantung pada potensi dan permasalahan yang ada di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah sehingga proses pembangunan ekonomi dapat sesuai dengan apa yang di inginkan.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, maka Kabupaten Wonogiri berupaya mensejahterahkan masyarakatnya dengan melihat kondisi dan potensi ekonomi daerahnya karena hal tersebut merupakan modal dasar dan faktor yang paling dominan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Upaya pembangunan ekonomi bukan hanya tugas atau program pemerintah pusat saja namun juga merupakan tugas atau program dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan proses pembangunan yang menjadikan daerah tersebut lebih baik dan stabil dari sebelumnya. Maka dari itu, harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada hakekatnya pembangunan regional adalah suatu pelaksanaan dari pembangunan nasional pada wilayah tertentu yang di sesuaikan dengan kemampuan ekonomi regional tersebut (Soebagyo, 2015).

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah maka pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu meningkatkan pertumbuhannya dengan cara menyesuaikan potensi yang dimiliki oleh daerahnya, hal tersebut merupakan kebijakan utama yang perlu dilaksanakan dengan usaha semaksimal mungkin supaya prioritas pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Wonogiri. Hal ini berhubungan dengan bermacam-macam potensi pembangunan yang dimiliki pada setiap daerah, maka setiap daerah memiliki kewajiban untuk menentukan sektor ekonomi yang dominan (Sjafrizal, 2014).



Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2020

Sumber: (BPS Kabupaten Wonogiri, 2021)

Dari gambar 1.1, diketahui bahwa laju pertumbuhan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga minus 1,41 persen dikarenakan adanya pandemi covid-19. Melihat fenomena yang terjadi, dapat diketahui bahwa kondisi saat ini masih jauh dari tujuan pembangunan ekonomi sehingga perlu dianalisis lebih jauh karena pasti terjadi suatu pergeseran struktur perekonomian terhadap

PDRB, dengan tujuan untuk mengetahui sektor apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan supaya dapat mengembangkan wilayah Kabupaten Wonogiri. Sehingga dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Potensi Sektor Ekonomi di Kabupaten Wonogiri Dengan Menggunakan *Location Quotient*, *Shift Share*, dan *Tipology Klassen*”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka pada penelitian ini timbul pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini diantaranya :

1. Sektor ekonomi manakah di Kabupaten Wonogiri yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Wonogiri?
2. Sektor ekonomi manakah di Kabupaten Wonogiri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah?
3. Sektor ekonomi manakah di Kabupaten Wonogiri yang tumbuh relatif cepat?
4. Sektor ekonomi manakah di Kabupaten Wonogiri yang mempunyai keuntungan lokasional yang baik?
5. Kabupaten Wonogiri berada pada klasifikasi *tipology* daerah manakah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam mengembangkan wilayah Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui sektor ekonomi di Kabupaten Wonogiri yang cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui sektor ekonomi di Kabupaten Wonogiri yang tumbuh relatif cepat
4. Untuk mengetahui sektor ekonomi di Kabupaten Wonogiri yang mempunyai keuntungan lokasional yang baik
5. Untuk mengetahui Kabupaten Wonogiri pada klasifikasi *tipology* daerah yang mana

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian mencakup data series antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 pada Kabupaten Wonogiri
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian potensi ekonomi ini menggunakan PDRB Kabupaten Wonogiri dan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan peneliti dapat menambah wawasan tentang sektor ekonomi yang potensial di Kabupaten Wonogiri.
2. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya, supaya dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan mengenai pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri pada khususnya.
4. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan dan juga sebagai literatur.